

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina & Setyaningrum. (2020). Determinants of the Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 3, 226–239.
- Akbar, R., & Ridwan. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan Dan Reputasi Kap Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4, 286–303.
- All, A. F. O. R. (2020). *Akuntabilitas UNTUK Semua*.
- Anjani, D. N., Ahyaruddin, M., & Agustiawan. (2025). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, INTEGRITAS DAN MORALITAS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD*. 6, 1331–1343.
- Aprilia Ika & Rasyid Ridho. (2021). *Duduk Perkara Korupsi Pengadaan Masker di Banten, “Kongkalikong” Pejabat dan Pengusaha di Era Pandemi*. Kompas.Com.
- Aprilia, D., Periansya, & Aryani, Y. A. (2025). *TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN TRANSPARANSI, PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA*. 6(1), 96–109.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2021). *Auditing and Assurance Services* (17th ed.). Pearson.
- Berita KPK. (2025). *Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024*.
- BPK RI. (2004). *PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA*.
- BPK RI. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006*. 1–25.
- BPK RI. (2017). *PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA* (Number 1).

- BPK RI. (2023). *BPK Discloses 9.261 Audit Findings Worth Rp18.19 Trillion in The First Semester Of 2023.*
- Dwiputrianti, S. (2008). *EFEKTIFITAS LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI TRANSPARANSI FISKAL DAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK (2001-2008) DI INDONESIA.* 397–415.
- Gedeona, H. T. (2005). *TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH: SEBUAH ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT DAERAH.* 258–267.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Diponegoro.
- hairudin dan erlanda. (n.d.). Khairudin, & Erlanda, R. (2016). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA SESUMATERA). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2).
- Huberts, L. W. J. C. (2018). *Integrity : What it is and Why it is Important* *Integrity : What it is and Why it is Important.* 9922. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). *HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018 PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018 Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) ten.* (April). <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3,* 305–360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE.* 3, 305–360.

- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2012-2015. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Kejaksanaan RI. (2025). *Kejati Banten Bongkar Dugaan Korupsi berjamaah Proyek Pengelolaan Sampah di DLH Kota Tangsel Senilai Rp75,9 Miliar*.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN FAIRNESS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)*. 12, 1–13.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) KPK 2023*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025*.
- Linggar. (2023). *PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL AUDIT, KERUGIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI INDONESIA TAHUN 2019-2021*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Mardiasmo, Ed.;
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). ANDI.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. 2, 1–87.
- Martini, M. (2025). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International.
- Muliawaty, L., Mustajam, A., Komar, M. A., Pasundan, U., Etis, P. K., & Etika, P. (2024). *INTEGRITAS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM SEKTOR PUBLIK : STUDI KASUS DAN PELAJARAN DARI*. 7(1), 33–39.
- Naibaho, E. N. S., & Shanti, Y. K. (2021). *PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI, TINDAKLANJUTI HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA*. 6.

- Nasution, Z., Angraeni, S., Zulaiha, A., Matan, H. M., Purbowati, P., Patimah, S., & Nagara, G. (2022). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Education integrity survey : A suggested measurement of integrity in education sector*. 8(2), 221–236.
- Ningsih, S. T. S., & Haryanto. (2022). *PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI*. 11, 1–11.
- Nisak, K., Riza, S., & Amirudin. (2023). *Pentingnya Trasparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korusi di Suatu Negara*. 1, 223–231.
- Nurfaidah & Novita. (2022). ANALISIS TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT ATAS KELEMAHAN SPI DAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA). *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, 27. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook* (OECD Publi).
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). *PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015- 2020)*. 12(2018), 1–9.
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). *PENGARUH OPINI AUDIT , TEMUAN AUDIT , DAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI JAWA TENGAH*. 11(2021), 1–8.
- Pramesti, L., & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akutansi Aktual*, 6, 280–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Rahmah Pertiwi, A. (n.d.). *PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI JAWA TENGAH*. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(2), 1–8. Retrieved <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rifa'i, B. (2022). *Kejati Banten Tangani 33 Kasus Korupsi di 2022, Rugikan Negara Rp 230 M*. DetikNews.

- Shofwah Maya, E. (2025). *Total Korupsi 2024 Sentuh Rp984 Triliun, Apa Saja Daftar Perkaranya?* GoodStats.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Sutopo, Ed.; 1st ed.). ALFABETA.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2017). *Journal Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Triya Setia Ningsih, S. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11, 1–11.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Valérian, F. (2025). *Corruption is blocking progress towards a sustainable world*. Transparency International.
- Virgiasari, A. (2009). *Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dengan kinerja keuangan daerah*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Wibowo, A., & Rossieta, H. (2006). *FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI KUALITAS AUDIT – SUATU STUDI DENGAN PENDEKATAN EARNINGS SURPRISE BENCHMARK*.
- Zawitri. (2009). Opini audit dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.